

# Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Presiden Joko Widodo Sebagai Cara Meminimalisir Korupsi Di Negara Demokrasi

Dina Fadiyah<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia

[dinafadiyah@ecampus.ut.ac.id](mailto:dinafadiyah@ecampus.ut.ac.id)\*

\* corresponding author

## ARTICLE INFO

### Article history

Received Desember 2023

Revised Januari 2024

Accepted Januari 2024

### Keywords

Implementation;  
Pancasila;  
Corruption.

## ABSTRACT

This article will discuss the implementation of President Joko Widodo's Pancasila values as a way to minimize corruption in democratic countries. Indonesia, as one of the democratic and developing countries that has a fairly high level of corruption in the world, is a fact that we still need to do a lot so that this title can fade from Indonesia's mind. One way is to instill Pancasila values in all Indonesian society without exception. This research uses implementation theory combined with descriptive qualitative research methods with literature review and literature study data collection techniques, it is hoped that it will be a contribution to social science today. The result is that President Joko Widodo has succeeded in implementing Pancasila values in Indonesia, this argument is proven by various policies and reforms related to Pancasila carried out in the current era.

## PENDAHULUAN

Penelitian ini akan mengkaji tentang penerapan atau pelaksanaan Nilai-nilai Pancasila yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo sebagai presiden Indonesia. Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu banyak masyarakat Indonesia terutama remaja yang kurang memiliki pengetahuan dan pengamalan terkait Pancasila, karena arus globalisasi dalam perkembangan ilmu teknologi yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Ini artinya, sebagian warga negara mungkin belum banyak yang memperhatikan dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya fenomena warga negara terutama anak-anak maupun remaja yang tidak hafal Pancasila dan ramai di media social.

Hal tersebut terjadi mungkin karena mereka menganggap *remeh* Pancasila, sekolah dan beranggapan bahwa dasar negara tersebut tidak penting untuk dihapal apalagi diimplementasikan. Melunturnya jiwa Pancasila dalam diri warga negara Indonesia ini tentu akan berakibat fatal dalam segi kehidupan bernegara dan juga akan mengancam



DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1459

Fadiyah, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Presiden Joko Widodo Sebagai Cara Meminimalisir Korupsi Di Negara Demokrasi (2023)

keutuhan dan keberlangsungan hidup bangsa, yang lebih mirisnya lagi Indonesia dapat terpecah keutuhannya, jika tidak ditanggulangi dengan baik tentu mengakibatkan masalah serius bagi bangsa Indonesia dimasa mendatang.

Oleh sebab itu, semenjak Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia sejak tahun 2014 silam, banyak terobosan-terobosan terkait Pancasila yang di implementasikan oleh Joko Widodo beserta jajarannya. Hal ini dianggap penting karena rasa memiliki terhadap Bangsa dan Negara harus tumbuh didalam setiap diri masyarakat Indonesia, tidak terkecuali. Pancasila sebagai ideologi Bangsa harus difungsikan disetiap elemen seperti kelembagaan, Pendidikan, kebudayaan, organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, menanamkan ideologi Pancasila disetiap kehidupan kita sehari-hari membuat kita sebagai masyarakat Indonesia sadar akan hak dan kewajibannya, contohnya yaitu korupsi yang semakin merajalela di Indonesia. Harapannya, ketika Pancasila ditanamkan dan diimplementasikan, nilai-nilai Pancasila tersebut bisa meminimalisir tindak pidana korupsi yang mana jika kita cinta dan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap Indonesia, mustahil rasanya tindak korupsi bisa dilakukan apalagi oleh pejabat Negara. Hal ini dikarenakan beberapa yang penulis anggap menarik diatas, penulis tertarik menelisik lebih dalam terkait implementasi nilai-nilai Pancasila yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo semenjak beliau dilantik hingga saat ini, tentunya yang dimaksudkan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi yang marak terjadi di Indonesia.

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu (Bosofi, 2015). Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Implementasi menurut kamus Webster adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan pengadilan. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam Oxford Advance Learner's Dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah "Put something into effect" yakni penerapan, sesuatu yang memberikan efek atau dampak (Mulyasa, 2006).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada 2 (dua) pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik (Dwidjowijoto, 2004). Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap tidak ada perubahan lagi. (Subarsono, 2011) mengemukakan beberapa teori implementasi, salah satunya adalah teori dari George C. Edward. Dalam pandangan Edward, implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi. *Pertama*, komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. *Kedua*, sumber daya dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. *Ketiga*, disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadang kala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda. *Keempat*, birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan disposisi terdiri dari aspek pada struktur organisasi yakni *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

## METODE

Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan mengenai desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan dan teknik analisa data berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlaku pada saat ini di lapangan yang di jadikan objek penelitian, kemudian data atau informasinya di analisis sehingga di peroleh suatu pemecahan masalah. Sedangkan pendekatan kualitatif dipandang lebih relevan dan cocok karena bertujuan menggali dan memahami apa yang tersembunyi dibalik komunikasi pemasaran *Yellow Truck* Bandung dalam menarik minat konsumen melalui promo *Student Card*. Seperti dikatakan David Williams dalam buku Lexy Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah (Moleong, 2007). Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan mengintreprestasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Peneliti juga melakukan pencarian data melalui sumber-sumber tertulis untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian ini. Menurut penjelasan Rosady Ruslan, studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan materi data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. (Rosady, 2003). Dalam studi literatur ini, peneliti menganut sistem kepastakaan terbuka dimana dengan mengumpulkan data atau keterangan melalui bahan bacaan mengenai masalah-masalah yang diteliti. Selanjutnya, *internet searching* merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat / mesin pencari di



internet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. *Internet searching* sangat memudahkan dalam rangka membantu peneliti menemukan suatu file/ data dimana kecepatan, kelengkapan dan ketersediaan data dari berbagai tahun tersedia. Mencari data di internet bisa dilakukan dengan cara *searching, browsing, surfing* ataupun *downloading*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang menjadi pedoman, pondasi, kaidah hukum yang mengatur dan menyelenggarakan. Andaikata negara menjadi bangunan, maka pancasila adalah fondasinya yang akan menjadi pijakan. Dalam pembuatan peraturan, kebijakan, dan perundang-undangan bangsa Indonesia yang kita cintai ini, Pancasila menjadi dasar dan pondasinya. Dan berbagai peraturan di Indonesia, semua berpijak pada pancasila baik dalam bidang sosial, politik, pendidikan, budaya, pendidikan maupun pertahanan dan keamanan. Pancasila berisikan nilai-nilai luhur yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan Hidayat bahwasannya Pancasila memiliki nilai kebudayaan yang dijadikan pondasi dan dasar dalam suatu kegiatan ataupun proses pendidikan yang multicultural (Hidayat, 2019).

Dalam Pancasila mengandung berbagai nilai-nilai pengajaran mulia, yang didalamnya mengandung kearifan lokal kedaerahan, kebudayaan, suku, adat dan agama di Indonesia. Untuk melestarikannya dan menerima nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat pengikutnya, menentukan baik dan buruknya, pantas dan tidaknya dengan melalui proses menimbang. Dan dalam masyarakat Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat menonjol baik dari segi agama, bahasa, adat, suku, kebudayaan, sehingga tidak heran jika masyarakat Indonesia terdapat banyak sekali perbedaan tentang tata nilai yang terdapat dalam masyarakat, dan juga nilai sosial dapat diidentifikasi dengan memperhatikan berdasarkan nilai sosial (Santoso, 2020).

Implementasi dalam kehidupan sosial masyarakat tentang nilai-nilai pancasila sangat dibutuhkan, karena menerapkan nilai-nilai pancasila akan berpengaruh pada pola pikir masyarakat dan acuan bagaimana sejatinya pancasila sebagai dasar negara itu bukan dari hasil pemikiran orang lain ataupun bangsa lain akan tetapi pancasila adalah murni dari pandangan, jiwa, ideologi bangsa kita sendiri yaitu bangsa Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo, sejak tahun 2014 ketika beliau pertama kalinya dilantik, sangat mengedepankan dan menggaungkan nilai-nilai Pancasila. Tidak sedikit terobosan-terobosan yang presiden dan tim lakukan terkait nilai-nilai Pancasila. Mengadopsi teori implementasi dari George George C. Edward meliputi komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi *distorsi* implementasi. Dalam hal tersebut jelas Presiden Joko Widodo beserta jajarannya sangat komunikatif terkait Pancasila, terlihat jelas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.



Gambar 1. Salah satu bentuk komunikasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Presiden Joko Widodo

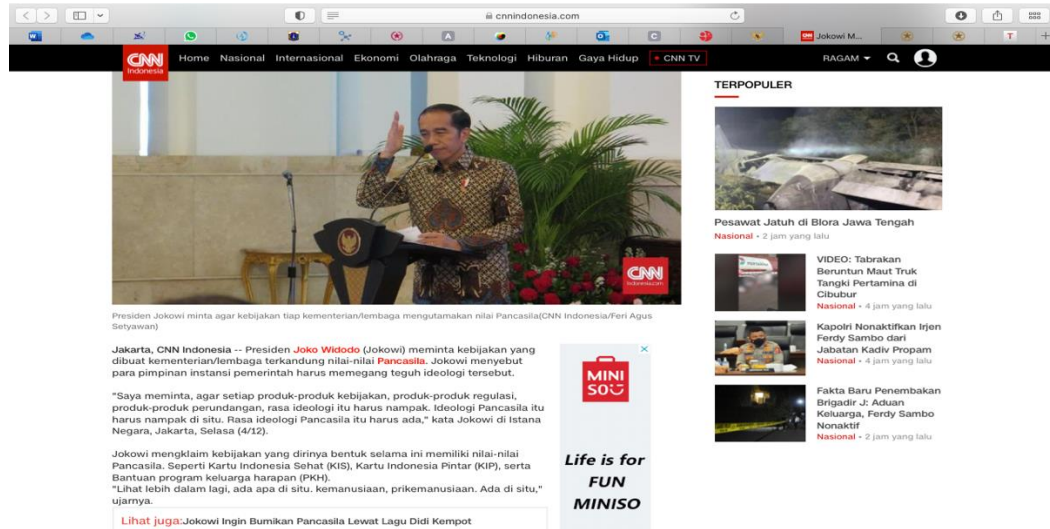
Sumber: (<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-setiap-produk-kebijakan-harus-nampak-rasa-ideologi-pancasila/>) diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 23.16 WIB.

Dalam *Presidential Lecture* Mengenai Internalisasi dan Pembumih Pancasila, di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 3 Desember 2019, Jokowi mengatakan bahwa di setiap kementerian, di setiap lembaga, di jajaran TNI, Polri, Jaksa Agung, BIN semuanya sama. Kepemimpinan harus memegang yang namanya ideologi, tanpa juga harus kita sampaikan, tetapi rasa memiliki ideologi itu kelihatan. Dikesempatan tersebut juga beliau mengatakan semua kementerian/lembaga harus melihat, harus jelas target utamanya. Pak Presiden mengingatkan bahwa:

“semua yang hadir di sini membawa negara sebesar ini, 267 juta, ya mestinya target ke depannya yang ingin ditransfer nilai-nilai ini, siapa. Kita melihat struktur demografi kita, siapa. Ya, anak-anak muda kita. Yang mau kita kejar ini. Karena ke depan, 129 juta anak-anak muda, itu hampir 48 persen, kalau ini tidak mengerti masalah ideologi, enggak mengerti masalah Pancasila, berbahaya negara ini,”

Selain itu, kebijakan lain yang Pancasilais yang dikeluarkan Presiden Jokowi bahkan sebelum beliau dilantik yaitu adanya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dimana itu semua berlandaskan Peri kemanusiaan sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Presiden dan dirasakan langsung oleh masyarakat hingga saat ini, seperti yang dilangsir oleh berita online. Selanjutnya, salah satu sebuah *gong* kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi yaitu menjadikan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni sebagai hari libur Nasional. Keputusan tersebut tertuang pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, dimana tujuannya adalah agar masyarakat Indonesia bisa mengingat perjuangan Indonesia dalam melawan kolonialisme.





Gambar 2. Salah satu bentuk komunikasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Presiden Joko Widodo

Sumber: (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191204014712-32-453927/jokowi-minta-setiap-kebijakan-tertanam-nilai-nilai-pancasila>) diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 23.55 WIB

Implementasi yang kedua adalah Sumberdaya, dimana dalam hal ini sangatlah jelas bahwa implelementasi nilai-nilai Pancasila telah dilakukan oleh Presiden RI tersebut misalnya pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo juga membuat Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2017 dimana Perpres ini disusun dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memerlukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara dengan kejelasan arah yang terencana, sistematis, dan terpadu (<https://setneg.go.id>).

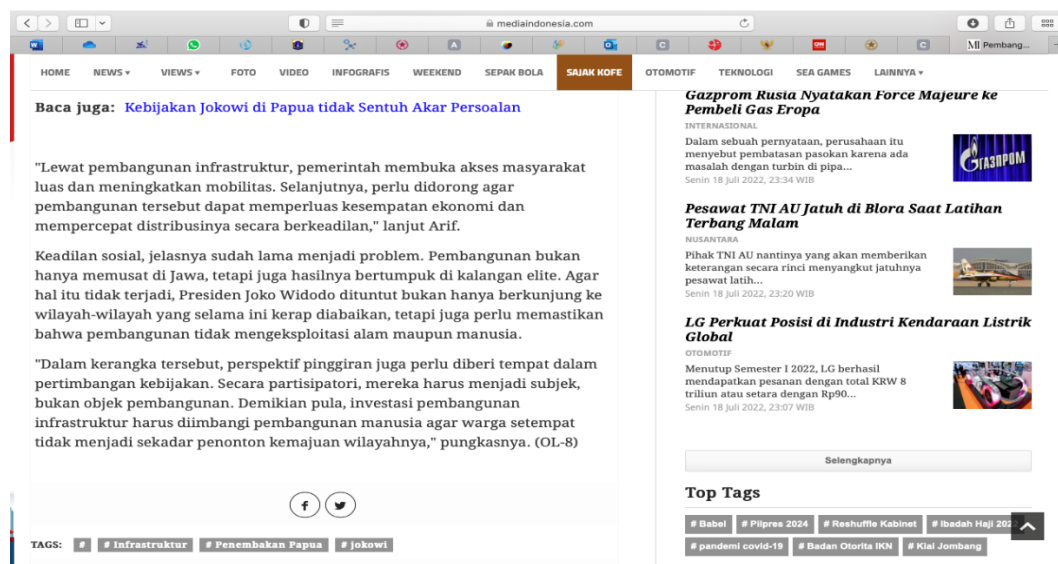
Lembaga kedua yang dibangun adalah BPIP pada tahun 2018. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (disingkat BPIP) adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya (<https://bPIP.go.id>).

Kebijakan lainnya yaitu Presiden Jokowi menunjuk Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pembina Duta Pancasila Paskibraka. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka yang berlaku mulai 5 April 2022 dimana Dewan Pembina Duta Pancasila Paskibraka beranggotakan Menteri



Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala BPIP. Adapun, Duta Pancasila Paskibraka terdiri dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Nantinya, BPIP bertugas memberikan pembinaan terhadap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Pembinaan itu meliputi pembentukan anggota, peningkatan kompetensi anggota, kegiatan atau aktivitas kepaskibrakaan, dan kegiatan pengarus utamaan Pancasila.

Implementasi yang ketiga yaitu disposisi, dimana jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah melakukannya, salah satunya yaitu dengan kebijakan membangun tol trans Kalimantan pada tahun 2016 dan saat ini tol tersebut sudah bisa digunakan dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pembuatan tol trans Kalimantan tersebut dipicu untuk pemerataan pembangunan, dimana menurut Presiden Joko Widodo itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang dilansir dalam berita online berikut, dimana dikatakan keadilan sosial sudah lama menjadi problem, pembangunan bukan hanya memusat di Jawa, tetapi juga hasilnya bertumpuk di kalangan elite.



Gambar 3. Salah satu bentuk disposisi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Presiden Joko Widodo

Sumber: (<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/268342/pembangunan-infrastruktur-dari-pinggir-untuk-keadilan-sosial>) diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 00.32 WIB

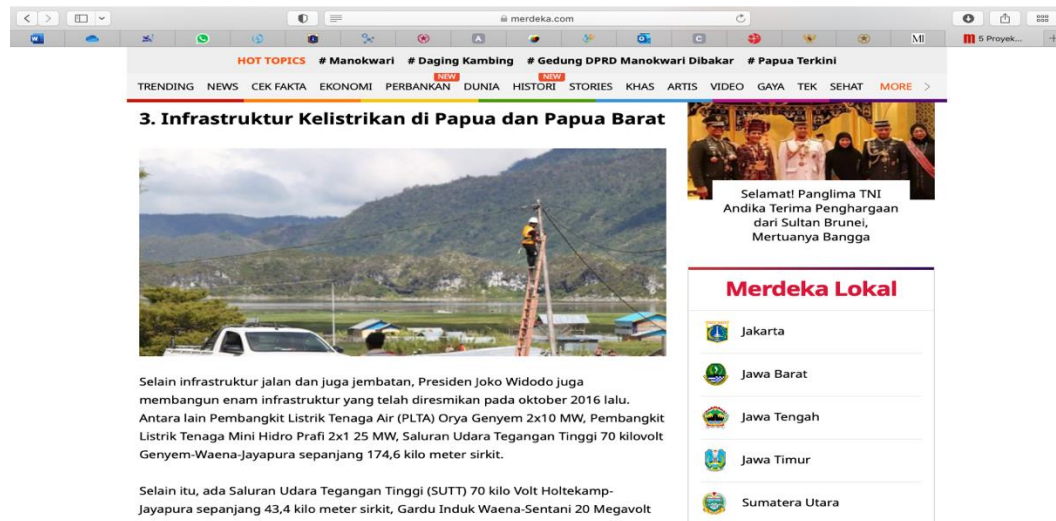
Kemudian selanjutnya yang keempat birokrasi, Presiden Joko Widodo juga gencar membangun Indonesia Timur seperti jalan trans Papua dan infrastruktur kelistrikan di Papua yang kini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Papua. Papua menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo dimana pemerintah saat ini ingin sekali Papua menjadi daerah maju dan berkembang. Kemajuan Papua yang kini sudah mulai terlihat, tidak lain dan tidak



bukan juga untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fakta kemajuan tersebut juga dilansir oleh berita online.

Pembangunan-pembangunan tersebut sangatlah bermanfaat dan sudah dirasakan langsung oleh para masyarakat Papua. Hingga saat ini, hanya Presiden Jokowi yang sering berkunjung ke Papua dibandingkan dengan Presiden lainnya. Hal ini membuat masyarakat Papua merasa diperhatikan, diperdulikan, hingga merasa bahwa nilai-nilai Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nyata adanya. Setidaknya Presiden Jokowi sudah berusaha untuk bisa merealisasikan nilai tersebut.

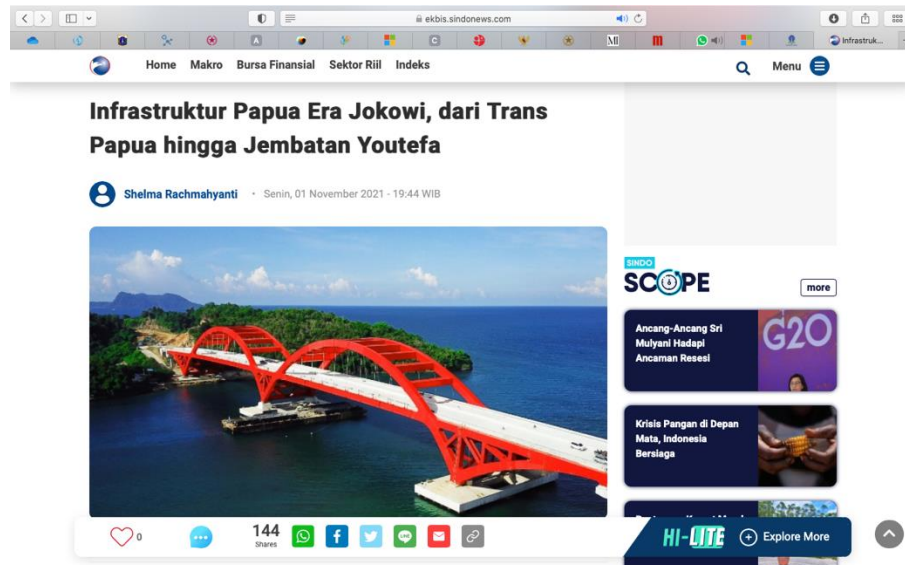
Segala yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo terkait korelasi antara penanaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dengan berkurangnya tindak pidana korupsi, bukanlah isapan jempol semata. Melihat grafik dan peringkat *Corruption Perceptions Index* (CPI) dari 2016-2022, semakin lama Indonesia semakin meningkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yaitu dari peringkat 36 meningkat ke peringkat 38, artinya kasus korupsi semakin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini semakin membuktikan bahwa dengan adanya penanaman nilai-nilai Pancasila didalam diri masyarakat Indonesia, sedikit banyak membantu untuk meminimalisir kasus korupsi di Indonesia.



Gambar 4. Bentuk pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk angkat kesejahteraan warga papua

Sumber: (<https://www.merdeka.com/uang/5-proyek-pembangunan-jokowi-di-papua-demi-angkat-kesejahteraan-warga.html>) diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 00.45 WIB





Gambar 5. Salah bentuk pembangunan infrastruktur oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Sumber: (<https://ekbis.sindonews.com/read/586324/34/infrastruktur-papua-era-jokowi-dari-trans-papua-hingga-jembatan-youtefa-1635768703>) diakses pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 05.15 WIB

## KESIMPULAN

Modernisasi global rupanya memberikan dampak yang sangat signifikan bagi Indonesia, terutama dalam hal ideologi. Dimana ideologi seharusnya menjadi satu hal penting yang memang harus selalu dijaga dan dipertahankan sebab itulah identitas Bangsa Indonesia. Pergeseran nilai-nilai Pancasila yang mulai terlupakan di masyarakat Indonesia, mulai diupayakan Kembali kehadirannya pada era Joko Widodo, dimana pada era tersebut pemeritah sangat ambisius untuk dapat menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Salah satu alasan utamanya adalah agar dapat meminimalisir tindak pidana korupsi, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang korupsi terbesar.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa Presiden sangat *concern* terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat Indonesia. Dibuktikan dengan banyaknya program-program baru yang sangat pro-Pancasila dan berbagai regulasi yang telah dikeluarkannya. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk menyasar tindak korupsi, tentu demikian pastinya tetap tidak akan mudah untuk memberantas korupsi bahkan sampai ke akarnya. Akan tetapi, dengan salah satu cara yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila, harapan dan tujuannya adalah agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mencintai Negeranya dengan penuh rasa tanggungjawab dan rasa memiliki.

Dengan banyaknya program dan regulasi yang sudah dikeluarkan terkait Pancasila guna menekan angka korupsi, membuat masyarakat Indonesia tersadar bahwa ternyata korelasi antara Pancasila dengan korupsi sangatlah relevan, dimana jika kita sebagai



masyarakat Indonesia bisa menanamkan, menjalankan serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dengan baik dan sudah tertanam didalam hati serta tindakan, niscaya untuk melakukan tindak korupsi sangatlah berat, karena korupsi merupakan hal yang sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Oleh karena itu, meningkatnya program-program yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila saat ini sangatlah tepat dan harus tetap dikembangkan dari hulu hingga hilir sehingga tujuan baik Bangsa Indonesia ini dapat diwujudkan.

## REFERENSI

- AG. Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bosofi, S. (2015). *Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013*. Riau: Universitas Riau.
- Dwidjowijoto, R. N. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hidayat, Dewi. (2019). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Degradasi Moral Terhadap Isu Sara Dan Hoax*, Jurnal Rontal Keilmuan PKN Vol.5 No.1
- Moleong, J. L. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. (2006). *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ruslan, Rosady. (2003). *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja
- Santoso, Thomas. (2020). *Memahami Modal Sosial*. Surabaya: Pustaka Saga  
(<https://bpip.go.id>)  
(<https://setneg.go.id>)  
<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-setiap-produk-kebijakan-harus-nampak-rasa-ideologi-pancasila/>  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191204014712-32-453927/jokowi-minta-setiap-kebijakan-tertanam-nilai-nilai-pancasila>  
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/268342/pembangunan-infrastruktur-dari-pinggir-untuk-keadilan-sosial>  
<https://www.merdeka.com/uang/5-proyek-pembangunan-jokowi-di-papua-demi-angkat-kesejahteraan-warga.html>  
<https://ekbis.sindonews.com/read/586324/34/infrastruktur-papua-era-jokowi-dari-trans-papua-hingga-jembatan-youtefa-1635768703>

